



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAGUS KURNIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA**
3. NHK : **754280**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.670.618.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/55 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 770.000.000
2. Tanah Seluas 1.420 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/54 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/10 m2 di KAB / KOTA BATANG, Rp. 20.810.000
5. Tanah Seluas 622 m2 di KAB / KOTA BATANG, Rp. 39.808.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **384.000.000**

1. MOBIL, HONDA HRV E Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VELOZ Q Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **190.110.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	250.415.996
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.495.143.996
III. HUTANG	Rp.	142.578.192
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.352.565.804

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.